

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	
Lembar Pernyataan	
Abstrak	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SEJARAH HUKUM PERTAMBANGAN, KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN	28
A. Sejarah Hukum Pertambangan di Indonesia	28
B. Kewenangan	32
C. Pemerintahan Daerah	39
D. Perizinan dan Izin Usaha Pertambangan (IUP)	41
BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERBITKAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	70
A. Hasil Wawancara dan Survey	70

BAB IV	ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENERBITKAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	79
	A. Kedudukan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Keluarnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Bandung Barat	79
	B. Kendala yang Timbul dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Bandung Barat Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	83
	C. Cara Penyelesaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang Tumpang Tindih Kewenangan	85
BAB V	PENUTUP	87
	A. Kesimpulan	87
	B. Saran	88
	Daftar Pustaka	91
	Lampiran	